



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Kesehatan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 4 September 2017
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Meminta penjelasan Kementerian Kesehatan RI mengenai program imunisasi Measles-Rubella, termasuk anggaran, target dan sasaran serta penanganan laporan masyarakat atas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).2. Meminta penjelasan dan laporan dari Kementerian Kesehatan RI tentang proses akhir Pengangkatan Bidan PTT menjadi CPNS.3. Meminta penjelasan Kementerian Kesehatan RI mengenai kebijakan iklan obat dan obat tradisional serta tindakan yang diambil terhadap pengobatan tradisional yang menjamin kesembuhan.4. Meminta penjelasan Kementerian Kesehatan RI atas tindak lanjut Rekomendasi Panja Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan yang sudah disampaikan ke Pemerintah.
Ketua Rapat	: DR. H.Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 1 DPR RI Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	: A. 20 orang dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI. Izin 2 orang. B. Menteri Kesehatan RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dibuka pukul 14.15 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Mempertimbangkan bahwa imunisasi dasar merupakan hak anak dan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengintensifkan kampanye dan sosialisasi Program Imunisasi Measles-Rubella kepada masyarakat dari keseluruhan tahapan imunisasi, termasuk memberikan respon yang cepat terhadap isu yang berkembang melalui berbagai media.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden untuk mengangkat CPNS sehingga dapat menjadi payung hukum bagi pengangkatan seluruh dokter, dokter gigi dan bidan PTT yang telah mengikuti seleksi dan berusia di atas 35 tahun.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengawal dan ikut mempercepat proses terakhir pengangkatan Bidan PTT menjadi CPNS yaitu penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan Pengangkatan CPNSD oleh Bupati/Walikota sehingga Bidan PTT dapat segera menerima gaji dan tunjangan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk memperketat pengawasan pelaksanaan kebijakan terkait iklan kesehatan tradisional dan juga memberikan pendampingan terhadap penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional sehingga pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, bersama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk segera mengimplementasikan rencana tindak lanjut rekomendasi hasil Panja DAK Bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI sebagaimana yang telah dipaparkan pada Rapat Kerja hari ini.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI mempersiapkan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya terkait obat dan alat kesehatan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri sehingga akses ketersediaan obat dan alat kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu.

7. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI yang disampaikan pada Rapat Kerja hari ini, termasuk laporan perkembangan penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2017, paling lambat tanggal 11 September 2017.

Rapat diakhiri pukul 18.00 WIB.

**KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,**



DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA
A-460